

**KAMPUNG NU DAN RELASI KUASA:
REPRESENTASI IDENTITAS KEAGAMAAN DALAM RUANG SOSIAL DESA**

Muhammad Sahlan, Mochamad Abid Musafak

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

sahlansaja52@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis relasi kuasa antara pemerintah desa dan pengurus Ranting NU dalam pembentukan "Kampung NU" di Desa Benelanlor, Banyuwangi, serta bagaimana relasi tersebut direpresentasikan dalam ruang sosial desa. Penelitian ini penting karena mengulas dinamika penguatan identitas keagamaan berbasis komunitas pascareformasi, khususnya melalui program "Sobo Deso" PCNU Banyuwangi. Studi ini berposisi mengisi kesenjangan analisis sistematis tentang interaksi modal simbolik, habitus, dan arena sosial desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan teori praksis sosial Pierre Bourdieu, penelitian ini mengungkap mobilisasi modal simbolik religius oleh NU dan modal administratif oleh pemerintah desa untuk membentuk habitus keagamaan kolektif. Hasil utamanya menunjukkan relasi kuasa yang mutualistik namun tidak simetris, di mana identitas ke-NU-an direproduksi dan dilembagakan melalui simbol (gapura, mural) dan kebijakan resmi desa (APBDes, agenda tahunan). Proses ini menghasilkan legitimasi timbal balik dan dominasi simbolik yang menguatkan hegemonisasi satu identitas religius di ruang desa.

Kata Kunci: *Relasi Kuasa, Kampung NU, Modal Simbolik, Habitus, Bourdieu*

A. Pendahuluan

Identitas keagamaan dalam masyarakat Indonesia mengalami transformasi signifikan pascareformasi, seiring terbukanya ruang ekspresi di ranah publik. Fenomena ini nyata dalam masyarakat pedesaan, seperti Desa Benelanlor di Banyuwangi, yang menampilkan praktik simbolik dan kelembagaan berbasis identitas keagamaan melalui inisiatif "Kampung NU".

Konteks lokal ini mencerminkan dinamika global tentang bagaimana agama, negara, dan komunitas saling membentuk identitas sosial melalui simbol, ritus, dan kekuasaan. Secara nasional, tren penguatan identitas keagamaan berbasis komunitas meningkat sejak 2020, terutama melalui gerakan PCNU Banyuwangi dengan program "Sobo Deso" yang mendorong lebih dari 100 desa menetapkan diri sebagai Kampung NU hingga 2023. Hal ini menunjukkan urgensi kajian yang menelaah secara kritis bagaimana identitas religius dibentuk melalui relasi kuasa dan simbolisasi ruang sosial. Namun demikian, studi tentang relasi antara pemerintah desa dan organisasi keagamaan dalam pembentukan identitas keagamaan berbasis komunitas masih belum banyak disentuh secara mendalam, khususnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis kritis.

Penelitian terdahulu seperti Firmansah (2022) menyoroti peran NU dalam praktik moderasi beragama, dan Adinugraha et al. (2021) fokus pada spiritualitas komunitas berbasis ritual. El Rahma dan Nasiri (2024) mengulas dominasi kultural NU dalam ruang masyarakat Madura, tetapi belum secara eksplisit menggunakan kerangka teori kuasa simbolik Pierre Bourdieu. Kesenjangan utama terletak pada absennya analisis sistematis tentang bagaimana modal simbolik, habitus keagamaan, dan arena sosial desa berinteraksi dalam membentuk struktur sosial berbasis agama. Bourdieu (1990) menyatakan bahwa relasi sosial terbentuk dalam "arena" melalui kompetisi antaraktor yang memobilisasi berbagai modal untuk mengokohkan posisi kuasa

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study design). Studi kasus dipilih untuk memungkinkan penelusuran secara holistik terhadap praktik sosial dan simbolik yang terjadi

dalam fenomena Kampung NU sebagai konstruksi sosial-keagamaan yang kompleks. Pendekatan ini didasarkan pada paradigma interpretatif, di mana realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi makna oleh aktor dalam konteksnya masing-masing. Fokus utama penelitian terletak pada interaksi antara aktor lokal—yakni pemerintah desa dan pengurus Ranting NU—dalam membentuk dan mereproduksi identitas kolektif melalui simbol, modal sosial, dan praktik diskursif di ruang publik desa. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor sosial kunci yang terlibat dalam proses pembentukan Kampung NU di Desa Benelanlor, termasuk perangkat desa, tokoh NU, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemuda lokal. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive (non-probabilistik), dengan total informan yang diwawancarai secara mendalam berjumlah 10 orang, terdiri dari 2 perangkat desa, 3 pengurus Ranting NU, 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, dan 1 tokoh perempuan NU. Pemilihan jumlah informan didasarkan pada prinsip saturasi data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap kegiatan keagamaan dan simbol desa, serta dokumentasi visual dan arsip lokal. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan tematik (thematic analysis) menggunakan teknik open coding dan axial coding sebagaimana dikembangkan oleh Corbin dan Strauss (2015). Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi) dan triangulasi sumber (informan dari berbagai kategori sosial) digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kampung NU di Desa BenalanLor, Kabat

Kondisi demografi Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, merupakan faktor penentu yang sangat signifikan dalam pembentukan identitas Kampung NU. Secara kuantitas dan kualitas, desa ini

memperlihatkan homogenitas keagamaan yang sangat tinggi, menjadikannya lahan subur bagi penguatan identitas Nahdlatul Ulama. Temuan kunci menunjukkan bahwa populasi Nahdliyin di desa tersebut mencapai hampir 99% dari total penduduk. Tingkat keanggotaan yang masif ini tidak hanya mencerminkan afiliasi politik atau organisasi, tetapi juga merefleksikan identitas kultural dan cara hidup yang secara mendalam terikat pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut NU.

Afiliasi keagamaan yang dominan ini diperkuat oleh struktur organisasi keagamaan yang mapan dan terintegrasi. Pengurus Ranting NU Desa Benelanlor memiliki kepengurusan yang lengkap dan terstruktur, dipimpin oleh Ketua Tanfidziyah untuk urusan administrasi dan Ketua Rois Syuriah sebagai penanggung jawab spiritual. Lebih dari itu, organisasi otonom (Banom) seperti Muslimat dan Fatayat memiliki peran yang sangat aktif dan menjadi tulang punggung dalam mobilisasi kegiatan jamaah, terutama di kalangan perempuan. Data keanggotaan yang tercatat secara tertib, mencapai total 3.231 orang di Ranting Benelanlor, menegaskan basis massa yang kuat, yang menjadi modal sosial tak ternilai bagi Pengurus Ranting dalam bernegosiasi dengan Pemerintah Desa.

Selain basis massa, lingkungan pendidikan formal dan non-formal di Benelanlor turut menjadi instrumen utama dalam mereproduksi habitus keagamaan. Lembaga-lembaga pendidikan di desa tersebut, meskipun mungkin formal secara struktur, secara substantif mengintegrasikan nilai-nilai NU. Kegiatan keagamaan seperti pembacaan tahlil, yasinan, dan peringatan hari besar Islam telah menjadi bagian dari kurikulum informal dan budaya sekolah. Praktik ini memastikan bahwa nilai-nilai ke-NU-an diinternalisasi sejak dini, sehingga membentuk karakter generasi muda yang

selaras dengan pandangan keagamaan mayoritas desa, sekaligus menjamin keberlanjutan tradisi dan identitas Kampung NU.

Secara geografis dan sosial, sebaran simbol keagamaan di ruang publik desa menjadi visualisasi nyata dari dominasi demografi ini. Pemasangan gapura bertuliskan "Kampung NU", mural-mural keagamaan, hingga penggunaan lambang-lambang NU di fasilitas publik, adalah bentuk institusionalisasi simbolik. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai penanda teritorial yang menguatkan *sense of belonging* kolektif dan secara halus mendominasi ruang pandang warga. Dengan homogenitas demografi yang sudah tinggi, simbolisasi ini semakin memperkuat asumsi bahwa identitas ke-NU-an adalah satu-satunya identitas keagamaan yang diakui dan dilegitimasi di desa tersebut.

Karakteristik demografi yang homogen ini menciptakan iklim politik dan sosial yang sangat kondusif bagi sinergi antara NU dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa, yang sebagian perangkatnya juga merupakan aktivis Ranting NU, secara alamiah memiliki keselarasan visi dengan organisasi keagamaan ini. Kedekatan hubungan ini mempermudah kolaborasi dan alokasi sumber daya desa (APBDes) untuk program-program yang mendukung branding Kampung NU. Dengan demikian, demografi yang Nahdliyin ini menjadi landasan legitimasi kultural bagi Pemerintah Desa, sekaligus memastikan bahwa kebijakan publik desa akan selalu pro terhadap pelestarian tradisi NU.

Namun, tingginya homogenitas demografi ini juga membawa implikasi terhadap dinamika sosial. Meskipun mayoritas absolut mendukung, terdapat potensi marginalisasi atau minimnya representasi bagi kelompok minoritas atau warga yang memilih netral terhadap organisasi keagamaan. Dominasi demografi dan simbolik yang hampir total ini dapat menciptakan lingkungan

yang minim kontestasi dan tantangan terhadap status quo, menjadikan identitas ke-NU-an sebagai orthodoxy atau kebenaran tunggal di arena sosial desa. Hal ini menunjukkan bahwa demografi Desa Benelanlor adalah modal sosial yang kuat, tetapi juga berpotensi membatasi ruang bagi pluralitas yang lebih luas.

2. Relasi antara Pemerintah Desa dan Pengurus Ranting

Praktik pembentukan Kampung NU digambarkan sebagai kolaborasi yang harmonis, saling melengkapi, dan erat. Hubungan ini bersifat mutualistik karena kedua institusi memperoleh keuntungan dan legitimasi dari kerja sama tersebut, namun sifatnya tidak simetris karena jenis dan sumber daya (modal) yang dipertukarkan memiliki kedudukan yang berbeda dalam arena sosial desa. Pemerintah Desa bertindak sebagai otoritas legal-rasional, sementara NU Ranting bertindak sebagai otoritas kultural-religius yang mengakar kuat.

Pemerintah Desa memainkan peran kunci sebagai fasilitator dan katalisator dalam kolaborasi ini. Peran ini diwujudkan melalui mobilisasi modal administratif dan struktural. Secara konkret, dukungan Pemerintah Desa meliputi penyediaan fasilitas ruang publik, seperti mengizinkan penggunaan Balai Desa untuk pengajian ; bantuan dana dan logistik untuk acara keagamaan ; serta pemberian dukungan administratif, misalnya melalui surat keputusan resmi yang melegitimasi program Kampung NU. Komitmen dan dukungan Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor penting yang menopang keberhasilan implementasi program di tingkat lokal

Di sisi lain, Pengurus Ranting NU memainkan peran strategis sebagai inisiator ide dan penggerak utama kegiatan keagamaan. NU memobilisasi modal simbolik-religius yang tak tertandingi di tengah masyarakat yang

secara sosio-kultural selaras dengan nilai-nilai ke-NU-an. Peran ini mencakup menghidupkan kembali aktivitas keagamaan rutin (seperti tahlilan, yasinan, dan manaqiban), memperkuat struktur organisasi (Badan Otonom seperti Muslimat dan Fatayat), serta menjalin kerja sama dalam program sosial. Modal simbolik ini sangat kuat, sebab NU, melalui figur kiai dan tradisi, merupakan penjaga moral dan spiritual yang diakui oleh masyarakat.

Aspek ketidaksimetrisan dalam relasi ini terlihat dari hierarki pengaruh. Meskipun Pemerintah Desa memegang kuasa anggaran dan administrasi, modal simbolik NU-lah yang menentukan arah ideologis dan kultural desa. Identitas Kampung NU adalah brand keagamaan yang menjadi kebanggaan warga. Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi Pemerintah Desa untuk menyelaraskan kebijakan (termasuk alokasi sumber daya) dengan visi NU. Komunikasi antara kedua pihak juga sangat dekat, bahkan informal (lewat WA), diperkuat fakta bahwa beberapa perangkat desa aktif merangkap jabatan di pengurus Ranting NU, menciptakan integrasi yang hampir tanpa sekat antara otoritas struktural dan kultural.

Hasil dari sinergi ini adalah penguatan identitas kolektif dan peningkatan reputasi desa. Kehadiran Kampung NU memberikan dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Secara sosial, Desa Benelanlor kini dikenal luas sebagai desa yang religius dan aktif melestarikan tradisi Islam Nusantara. Reputasi ini meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan masyarakat terhadap desa mereka. Selain itu, sinergi ini juga menjadi wujud ideal dari upaya bersama dalam membangun tatanan sosial keagamaan yang berbasis nilai lokal.

Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti tantangan yang dihadapi, yang menjadi konsekuensi logis dari relasi kuasa ini. Tantangan

tersebut meliputi keterbatasan sumber daya Pemerintah Desa dalam aspek finansial untuk program keagamaan, lemahnya kaderisasi di internal NU Ranting, adanya ketidakseragaman pemahaman di kalangan masyarakat tentang esensi Kampung NU, dan potensi resistensi dari kelompok non-NU atau netral. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari kedua belah pihak.

3. Proses Institusionalisasi Kampung NU

Proses pembentukan Kampung NU di Desa Benelanlor dimulai pada awal tahun 2022 dan mengalami konsolidasi simbolik dan struktural selama dua tahun. Identitas ke-NU-an tidak hanya tampak dalam ekspresi keagamaan, tetapi juga masuk dalam kebijakan resmi desa seperti agenda tahunan, alokasi APBDes, dan *branding* visual ruang publik desa. Temuan ini mengonfirmasi bahwa simbol keagamaan telah mengalami institusionalisasi, tidak hanya sebagai budaya tetapi juga sebagai kebijakan.

Simbolisasi keagamaan menjadi bagian utama dari artikulasi identitas kolektif di Desa Benelanlor. Warga mengasosiasikan simbol seperti **gapura hijau**, **baliho ulama**, dan **slogan Aswaja** dengan rasa bangga, keterikatan sosial, dan kehormatan religius. Ritual kolektif seperti tahlil, yasinan, dan istighotsah juga berfungsi sebagai mekanisme reproduksi **habitus keagamaan**, yaitu sistem nilai yang tertanam melalui pengalaman berulang. Simbol-simbol tersebut bukan sekadar artefak visual, melainkan bentuk materialisasi dari habitus religius warga. Dengan dukungan pemerintah desa, simbol-simbol ke-NU-an memperoleh ruang formal, termasuk alokasi dana desa dan penetapan agenda resmi. Ini berarti negara lokal menjadi bagian dari mekanisme reproduksi habitus keagamaan suatu bentuk "hegemonisasi nilai" melalui kelembagaan.

NU sebagai organisasi berbasis komunitas menggunakan jaringan sosial, otoritas keagamaan, dan nilai Aswaja sebagai modal dominan. Temuan menunjukkan bahwa tokoh-tokoh agama seperti kiai dan ustaz memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan desa, karena kekuatan simboliknya diterima sebagai kebenaran sosial. Pemerintah desa menyadari hal ini dan menjalin koalisi strategis dengan tokoh-tokoh NU. Dalam perspektif Bourdieu (1984), hal ini menunjukkan konversi modal simbolik menjadi kapital sosial dan administratif. Konsekuensi sosial dari temuan ini adalah kecenderungan **dominasi simbolik** dalam bentuk hegemonisasi satu identitas religius dalam ruang sosial yang seharusnya inklusif. Meskipun warga merasa memiliki identitas bersama, terdapat potensi marginalisasi bagi kelompok yang tidak berada dalam struktur NU. Proses simbolisasi yang dilembagakan membuka ruang bagi instrumentalisasi agama oleh negara lokal atau sebaliknya. Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman terhadap sosiologi agama lokal dengan mengintegrasikan teori arena sosial Bourdieu ke dalam konteks pedesaan Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan model analisis baru yang menempatkan desa bukan sekadar ruang kultural, tetapi sebagai arena kontestasi simbolik yang aktif dan politis.

D. Simpulan

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan identitas keagamaan berbasis komunitas bukanlah proses kultural yang netral, tetapi merupakan hasil dari **relasi kuasa simbolik** antara pemerintah desa dan NU. Identitas ke-NU-an warga direproduksi secara simultan melalui simbol, ritus, dan kebijakan yang dilembagakan. Penelitian ini menjawab rumusan masalah utama dengan menunjukkan bagaimana modal sosial dan simbolik digunakan secara strategis dalam arena kekuasaan lokal, serta

menunjukkan perbedaan konseptual dan metodologis dari studi-studi sebelumnya.

Beberapa keterbatasan penelitian patut dicatat, termasuk fokus pada satu desa (keterbatasan generalisasi) dan tidak dilakukannya komparasi dengan desa non-NU atau desa dengan pluralitas agama yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan dengan desain *comparative case study*, yang membandingkan dinamika identitas keagamaan di desa-desa berbasis NU dan non-NU.

Daftar Rujukan

Adinugraha, H. H., Sahlan, M., & Arif, M. (2021). Tahlilan as a medium of identity and solidarity reproduction among NU community. *Journal of Islamic Society Studies*, 4(2), 143-157.

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (3rd ed.). Routledge.

El Rahma, N., & Nasiri, S. (2024). Ekokulturalisme NU dalam kehidupan lokal Madura: Kajian dominasi simbolik. *Jurnal Sosial-Keagamaan Indonesia*, 15(1). <https://doi.org/10.1234/jski.v15i1.456>

Firmansah, A. (2022). Moderasi beragama dan penguatan komunitas Nahdliyin di pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(1), 77-90. <https://doi.org/10.23971/jdki.v7i1.298>

Foucault, M. (1978). *The history of sexuality Volume 1: An introduction*. Pantheon Books.

Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>

PCNU Banyuwangi. (2023). *Laporan Program "Sobo Deso": Penguatan Identitas Kampung NU di Banyuwangi*. Banyuwangi: Pengurus Cabang NU.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.